



**PERANAN KEJAKSAAAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAAN  
NOMOR 16 TAHUN 2004**

**TESIS**

**TOTOK ALIM PRAWIRO WIDODO**

**1320922051**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2016**



**PERANAN KEJAKSAAAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAAN  
NOMOR 16 TAHUN 2004**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**TOTOK ALIM PRAWIRO WIDODO**

**1320922051**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2016**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Totok Alim Prawiro Widodo

NRP : 1320922051

Tanggal :

Jakarta,

2015

Yang Menyatakan,



Totok Alim Prawiro Widodo

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Totok Alim Prawiro Widodo

NRP : 1320922051

Program : Pascasarjana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Eklusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **PERANAN KEJAKSAAAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAAN NOMOR 16 TAHUN 2004**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 2015

Yang menyatakan



Totok Alim Prawiro Widodo

## PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

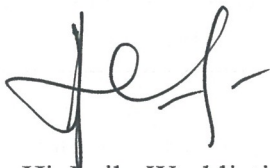
Nama : Totok Alim Prawiro Widodo

NRP : 1320922051

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis : Peranan Kejaksaan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004

Telah berhasil dipertahankan dalam pengujian di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Dra. Hj. Laily Washliati. SH, MHum  
Ketua Penguji



Dr. Moh. Hatta, SH, Sp.N  
Penguji Ahli



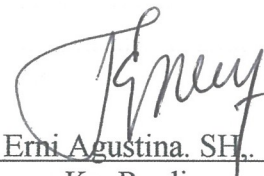
Dr. Erni Agustina. MH.Sp.N  
Penguji 1/ Pembimbing



Dr. Arrisman. SH. MH  
Penguji 2/ Pembimbing



Dr. Iwan Kresna Setiadi. SE., MM  
Direktur



Dr. Erni Agustina. SH., Sp.N  
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : .....

# **PERANAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN NOMOR 16 TAHUN 2004**

**Totok Alim Prawiro Widodo**

## **Abstrak**

Praktek korupsi yang semakin meningkat merupakan pekerjaan serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia, terutama pihak Kejaksaan. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia, kemudian mengetahui kedudukan dan peran jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah secara yuridis normatif dan sifat yang digunakan adalah yuridis deskriptik analitik diketahui bahwa Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. Kedudukan Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari pengaturan hukum kedudukan Jaksa di Indonesia yaitu berawal dari UU No. 15 tahun 1961 tentang Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian kejaksaan ditingkatkan menjadi Departemen Kehakiman pada tanggal 22 Juli 1991 UU No.5 tahun 1991 mengenai kedudukan, organisasi, jabatan, tugas dan wewenang kejaksaan untuk menggantikan UU No.15 tahun 1961 yang sudah tidak sesuai lagi. Kemudian UU No.5 tahun 1991 digantikan dengan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaanab Republik Indonesia. Peranan jaksa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara penal policy (memakai ketentuan pidana), Usaha pemberantasan kejahatan lewat pembuatan undang- undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Kendala- kendala yang dihadapi Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kendala yuridis dan non yuridis. nonyuridis, berupa faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam menangani kasus korupsi dan masih jauh dari yang diharapkan yaitu adanya kejujuran dan kedisiplinan dari kejaksaan tersebut.

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Pidana, Korupsi

# **ROLE OF THE PROSECUTOR IN COMBATING CORRUPTION PROSECUTOR UNDER LAW NO. 16 OF 2004**

**Alim Totok Prawiro Widodo**

## **Abstract**

Increasing corruption is a serious job for law enforcement efforts in Indonesia, especially the AGO. The research objective of this thesis was to determine the legal arrangements of corruption prevailing in Indonesia, then knowing the position and the role of prosecutors in combating corruption and to identify the barriers faced by the prosecutor in the eradication of corruption. With the type of research that is used in this thesis is normative juridical and juridical nature that is used is descriptive analytic note that the formulation of the corruption under this legislation is twofold, every act committed by anyone either for its own sake, for the sake of others, or on behalf of an entity that directly or indirectly cause financial loss or the economy. Position Attorney in combating corruption seen from the position of the Attorney legal arrangements in Indonesia, starting from Law No. 15 of 1961 on Principal Attorney of the Republic of Indonesia, then the prosecutor upgraded to the Ministry of Justice on July 22, 1991 Law No. 5 of 1991 regarding the position, organization, job title, duties and authority of the prosecutor to replace Law No.15 of 1961 which is no longer appropriate, Then Law No. 5 of 1991 was replaced by Law No.16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia. The role of prosecutors in corruption eradication efforts carried out by means of penal policy (using the criminal provisions), efforts to eradicate crime through law-making (law) essentially criminal is also an integral part of the business community protection. Constraints faced prosecutors in combating corruption is a juridical and non juridical constraints. Juridical constraints concerning the legislation is unclear and lacking accelerate the eradication of corruption, difficulty uncovering perpetrators of corruption also caused the failure of the Prosecution to provide evidence that can convince the judge, and the handling requires concentration as well as a proper understanding of the Constitution- Corruption Act. While the non-juridical constraints, the form factor of law enforcement officials is the lack of human resources in the triumph of corruption and is still far from the expected, namely the existence of honesty and discipline of the prosecutor's office.

**Keywords:** Attorney, Crime, Corruption

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul: “Peranan Kejaksaan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004”.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta.
2. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU selaku Pembimbing I.
3. DR. Arrisman, SH., MH selaku Pembimbing II.
4. Dr. Erni Agustina, SH, SPN selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis ,sehingga tesis ini dapat selesai.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan pembekalan perkuliahan.
6. Seluruh staf sekretariat Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti program tersebut.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Kejaksaan Agung maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan dvokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 2015

Totok Alim Prawiro Widodo



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	9
I.3 Tujuan Penelitian.....	10
I.4 Manfaat Penelitian.....	10
I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
I.6 Sistematika Penulisan .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	22
II.1 Tindak Pidana Korupsi .....	22
II.2 Peranan Kejaksaan.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
III.1 Tipe Penelitian .....	64
III.2 Sifat Penelitian.....	64
III.3 Sumber Data .....	65
III.4 Metode Pengumpulan Data.....	66
III.4 Metode Analisis Data .....	66
BAB IV TINJAUAN PUSTAKA .....	67
IV.1 Kedudukan dan Peranan Jaksa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	67
IV.2 Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	87
BAB V PENUTUP.....	95
V.1 Kesimpulan .....	95
V.2 Saran .....	
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	